



Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat 10 Juni 2026
Badan Kepegawaian Negara dengan Komisi II DPR RI

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Selamat Pagi, dan Salam Sejahtera bagi kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namu Buddhaya, Salam Kebajikan.

Yang terhormat,

Pimpinan dan Para Anggota Komisi II DPR RI;

Yang saya hormati,

1. Menteri PAN dan RB beserta jajaran;
2. Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia beserta jajaran;
3. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia beserta jajaran;
4. Ketua Ombudsman Republik Indonesia beserta jajaran;
5. Serta Bapak/Ibu peserta Rapat yang berbahagia.

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena hanya atas rahmat-Nya, kita dapat menghadiri Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR RI.

Pimpinan dan Anggota Komisi II yang saya hormati,

Pertama-tama, izinkan saya atas nama Badan Kepegawaian Negara menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI atas undangan dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat ini.

Pada kesempatan yang diberikan kepada BKN, saya akan menyampaikan perkembangan capaian kinerja BKN sampai dengan bulan Mei Tahun 2026, arah kebijakan dan rencana kerja Tahun 2027, serta kebutuhan dukungan anggaran agar pelaksanaan manajemen ASN dapat terus berjalan secara efektif, akuntabel, dan berkelanjutan.

Pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan empat bagian utama, yaitu: data statistik ASN; capaian kinerja dan realisasi anggaran BKN Tahun 2026; rencana kerja BKN Tahun 2027; serta pagu indikatif dan usulan kebutuhan tambahan anggaran BKN Tahun 2027.

Bapak Ibu Yang Kami Hormati (Statistik Aparatur Sipil Negara Slide 3)

Berdasarkan data per 1 Juni 2026, jumlah ASN secara nasional mencapai 6.765.071 orang. Komposisi tersebut terdiri atas 3.484.340 PNS atau sekitar 51 persen, 2.076.168 PPPK atau sekitar 31 persen, serta 1.204.563 PPPK Paruh Waktu atau sekitar 18 persen.

Dari sisi distribusi, sebanyak 5.311.354 ASN atau 79 persen bertugas pada instansi daerah, sedangkan 1.453.717 ASN atau 21 persen berada pada instansi pusat. Komposisi ASN terdiri atas 3.707.978 wanita atau 55 persen dan 3.057.093 pria atau 45 persen.

Berdasarkan kelompok generasi, ASN didominasi oleh Generasi Y sebesar 53 persen atau 3.738.926 orang, diikuti Generasi X sebesar 35 persen atau 2.352.099 orang, Generasi Z sebesar 10 persen atau 650.873 orang, serta kelompok Baby Boomers sebesar 1 persen atau 23.172 orang. Dari sisi tingkat pendidikan, mayoritas ASN berpendidikan D-IV/S1/Profesi sebanyak 58 persen. Sementara itu, kelompok jabatan terbesar adalah pelaksana sebanyak 2.583.489 orang dan jabatan fungsional guru sebanyak 2.299.604 orang.

Selanjutnya, izinkan kami menyampaikan beberapa capaian utama pelaksanaan tugas BKN pada Tahun 2026.

Bapak Ibu Yang Kami Hormati (Dukungan BKN untuk Layanan Seleksi dalam rangka Pemenuhan SDM Program Prioritas Presiden Slide 5)

BKN terus memberikan dukungan layanan seleksi dalam rangka pemenuhan sumber daya manusia untuk program prioritas Presiden. Layanan seleksi terintegrasi dengan layanan perencanaan kebutuhan ASN, sehingga proses penetapan formasi dapat dijaga konsistensinya sampai dengan pengusulan dan penetapan NIP maupun NI PPPK.

- Untuk Badan Gizi Nasional, BKN melaksanakan verifikasi dan validasi formasi, penetapan NIP sebanyak 2.065 pertimbangan teknis pada Tahun 2025 dan 32.597 pertimbangan teknis pada Tahun 2026, penetapan penugasan, serta proses pindah instansi.
- Untuk Sekolah Rakyat, BKN melaksanakan verifikasi dan validasi formasi serta penetapan NIP sebanyak 2.215 pertimbangan teknis pada Tahun 2025 dan 2.376 pertimbangan teknis pada Tahun 2026.
- Untuk Sekolah Unggul Garuda, BKN mendukung pemenuhan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah sebanyak 12 orang serta pemenuhan guru sebanyak 76 orang pada Tahun 2026.
- Untuk Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih, BKN mendukung pelaksanaan seleksi Program Hasil Terbaik Cepat dengan jumlah 380.852 peserta.

Bapak Ibu Yang Kami Hormati (Capaian Penerapan Manajemen Talenta ASN Slide 6)

Dalam pembangunan dan penerapan Manajemen Talenta ASN, BKN melakukan pendampingan kepada 643 instansi pemerintah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 588 instansi atau 91,4 persen telah menyatakan komitmen pembangunan Manajemen Talenta, sebanyak 202 instansi atau 31,4 persen telah memperoleh persetujuan penerapan, sebanyak 206 instansi atau 32 persen telah melaksanakan ekspose, dan sebanyak 99 instansi atau 15,4 persen telah menggunakan Manajemen Talenta untuk pengisian jabatan.

Dari 3.955 talenta yang diusulkan dalam pengisian jabatan, sebanyak 3.931 talenta atau 99,4 persen direkomendasikan dan sebanyak 24 talenta atau 0,6 persen belum direkomendasikan. Capaian ini menjadi pondasi penting untuk mewujudkan pengisian jabatan yang lebih objektif, terukur, dan berbasis sistem merit.

Bapak Ibu Yang Kami Hormati (Pengelolaan Kinerja Pegawai dengan Pengisian Kinerja Harian Slide 7)

BKN juga mendorong penerapan pengelolaan kinerja harian melalui layanan e-Kinerja. Sampai dengan 29 Mei 2026, sebanyak 97 instansi pemerintah telah menerapkan fitur kinerja harian, yang

terdiri atas 9 instansi pusat dan 88 instansi daerah. Jumlah ASN yang telah menggunakan fitur tersebut mencapai 1.054.419 orang atau 15,54 persen dari total ASN.

Penerapan kinerja harian diarahkan untuk memperkuat akuntabilitas kinerja individu, memudahkan pemantauan oleh atasan langsung, dan membangun basis data kinerja yang dapat digunakan dalam pengembangan karier serta pemberian penghargaan secara lebih adil.

Bapak Ibu Yang Kami Hormati (Rencana Pembinaan Manajemen ASN ke 643 Instansi Slide 8)

Untuk memperkuat kualitas penerapan manajemen ASN, BKN telah meluncurkan Sistem Monitoring Pembinaan Manajemen ASN Terintegrasi Tahun 2026-2027. Pembinaan ditargetkan kepada seluruh 643 instansi pemerintah, dengan pembagian 322 instansi pada Tahun 2026 dan 321 instansi pada Tahun 2027.

Pembinaan tersebut meliputi delapan aspek, yaitu perencanaan kebutuhan ASN dan standardisasi jabatan; implementasi Manajemen Talenta; pengelolaan kinerja ASN; pengembangan kompetensi ASN; budaya kerja dan citra institusi; penghargaan dan pengakuan; disiplin, pemberhentian, dan upaya administratif; serta digitalisasi manajemen ASN. Target akhirnya adalah meningkatnya nilai sistem merit instansi pemerintah, menurunnya tingkat pelanggaran manajemen ASN, dan penyelesaian permasalahan manajemen ASN secara lebih cepat.

Bapak Ibu Yang Kami Hormati (Peta Kebutuhan dan Karier Jabatan Fungsional Manajemen ASN Slide 9)

Dalam rangka memperkuat kapasitas pengelola manajemen ASN, BKN telah memberikan rekomendasi kebutuhan Jabatan Fungsional Manajemen ASN kepada 634 instansi pemerintah atau 98,60 persen dari keseluruhan instansi. Rekomendasi tersebut meliputi kebutuhan Analis SDM Aparatur pada 631 instansi, Asesor SDM Aparatur pada 249 instansi, Auditor Manajemen ASN pada 1 instansi, serta Pranata SDM Aparatur pada 289 instansi.

Sepanjang Januari sampai dengan Mei 2026, BKN telah menerbitkan 42 rekomendasi kebutuhan Jabatan Fungsional Manajemen ASN, terdiri atas 20 rekomendasi Analis SDM Aparatur, 10 rekomendasi Asesor SDM Aparatur, dan 12 rekomendasi Pranata SDM Aparatur.

Bapak Ibu Yang Kami Hormati (Kinerja Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN Slide 10)

Per 31 Mei 2026, BKN terus menyelenggarakan layanan manajemen ASN yang menjadi kewenangan kantor pusat dan kantor regional. Capaian layanan antara lain meliputi penetapan NIP sebanyak 48.939 pertimbangan teknis, kenaikan pangkat sebanyak 395.686 pertimbangan teknis atau SK, pindah instansi sebanyak 3.145 pertimbangan teknis atau SK, pencantuman gelar sebanyak 63.242 usulan, peremajaan data sebanyak 204.973 usulan, serta pemberhentian dan pensiun sebanyak 70.810 pertimbangan teknis.

Dalam aspek perencanaan kebutuhan ASN, sebanyak 4.471 usulan atau 90,58 persen telah dilayani sesuai standar. Pengisian informasi jabatan telah mencapai 73,75 persen. Selain itu, penyusunan Pertimbangan Teknis Nasional Tahun 2027 telah mencapai 60 persen, dengan pendekatan perhitungan berbasis potensi wilayah, karakteristik wilayah, dan fungsi pelayanan publik.

Bapak Ibu Yang Kami Hormati (Pengawasan Penerapan Sistem Merit Slide 11)

Sebagai tindak lanjut penguatan fungsi pengawasan sistem merit, BKN sedang menyusun rancangan Peraturan BKN mengenai pedoman pengukuran penerapan sistem merit. Rancangan tersebut akan memuat komponen maturitas sistem merit, batang tubuh pengaturan, serta komponen survei kepuasan dan keterikatan pegawai ASN.

Penyusunan pedoman ini penting untuk memastikan pengukuran sistem merit memiliki landasan yang lebih terstandarisasi, objektif, dan dapat diterapkan secara konsisten pada seluruh instansi pemerintah.

Bapak Ibu Yang Kami Hormati (Pengawasan Preventif Melalui Integrated Mutasi terhadap Jabatan Non-JPT Slide 12)

BKN berkomitmen melakukan perlindungan dan pengembangan karier ASN melalui layanan Integrated Mutasi atau I-Mut yang sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria. Dalam periode 1 Januari sampai dengan 1 Juni 2026, layanan ini memproses 64.338 ASN dan menghasilkan 6.881 rekomendasi.

Dari keseluruhan pengajuan tersebut, sebanyak 48.352 ASN atau 75,16 persen dapat dipertimbangkan atau direkomendasikan, sebanyak 8.367 ASN atau 13 persen dapat direkomendasikan dengan catatan, sebanyak 2.014 ASN atau 3,13 persen tidak dapat direkomendasikan, dan sebanyak 5.605 ASN atau 8,71 persen tidak dapat diproses. Dengan demikian, terdapat 7.619 ASN atau 11,84 persen yang perlu dilindungi dari proses yang tidak sesuai NSPK dan prinsip meritokrasi.

Beberapa alasan usulan tidak dapat dipertimbangkan antara lain karena usia atau pendidikan tidak memenuhi ketentuan, pengalaman jabatan belum memadai, kinerja dua tahun terakhir berada di bawah predikat baik, masa kerja jabatan belum memenuhi ketentuan, serta prosedur penegakan disiplin yang belum sesuai.

Bapak Ibu Yang Kami Hormati (Pengawasan Preventif Melalui Integrated Mutasi pada Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Slide 13)

Pada pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi, BKN melakukan pengawasan preventif melalui I-Mut terhadap proses seleksi terbuka, uji kompetensi atau job fit, serta evaluasi kinerja. Selama Tahun 2026, proses tersebut mencakup 9.149 jabatan dan pejabat.

Dari keseluruhan proses tersebut, terdapat 193 pengangkatan dan mutasi JPT atau 2,11 persen yang berpotensi melanggar NSPK dan prinsip meritokrasi. Pengawasan ini diperlukan untuk memastikan pengisian JPT berlangsung transparan, berbasis kompetensi, dan tidak mengabaikan ketentuan yang berlaku.

Bapak Ibu Yang Kami Hormati (Tindakan Administrasi Pemblokiran Slide 14)

Selain pengawasan preventif, BKN juga menerapkan tindakan administratif berupa pembatasan sementara akses terhadap layanan kepegawaian, baik kepada individu ASN melalui pemblokiran data ASN maupun kepada instansi melalui pemblokiran layanan instansi. Tindakan ini merupakan instrumen pengendalian untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan manajemen ASN.

Dalam Tahun 2025 dan 2026, pemblokiran telah diterapkan kepada sejumlah instansi dan individu ASN atas proses pengangkatan, pemberhentian, atau mutasi yang tidak sesuai NSPK, serta tindak lanjut perkara pidana atau pemberhentian lainnya. Setelah instansi menyelesaikan kewajiban perbaikan, BKN melakukan pembukaan blokir secara terukur. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pengawasan dilaksanakan secara tegas, namun tetap berorientasi pada koreksi dan perbaikan tata kelola.

Bapak Ibu Yang Kami Hormati (Platform ASN Digital dan Layanan Digital Manajemen ASN

Slide 15-16)

ASN Digital merupakan super platform digital manajemen ASN terpadu yang mengintegrasikan berbagai sistem manajemen kepegawaian. Per 1 Juni 2026, jumlah kunjungan ASN Digital mencapai 1.498.195.964 kunjungan dengan rata-rata 6.718.368 kunjungan per hari. Aktivasi multi-factor authentication atau MFA telah mencapai 6.379.268 ASN atau 94,30 persen dari total ASN.

Dukungan digitalisasi tersebut digunakan untuk pelaksanaan seleksi pengadaan SDM program prioritas melalui Layanan Seleksi ASN dan Layanan ASN Karier. Selain itu, ASN Digital memperkuat sistem merit melalui Layanan Kinerja, Layanan Penilaian Kompetensi atau PROASN, Layanan Manajemen Talenta atau SIMATA, Layanan Integrated Mutasi atau I-Mut, serta Layanan Peremajaan Data.

Bapak Ibu Yang Kami Hormati (Capaian Indeks Kualitas Data ASN Slide 17)

Kualitas data ASN menunjukkan perbaikan yang signifikan. Per 4 Juni 2026, jumlah instansi dengan predikat tinggi dan sangat tinggi meningkat menjadi 550 instansi, terdiri atas 543 instansi dengan predikat tinggi dan 7 instansi dengan predikat sangat tinggi. Dibandingkan kondisi awal, terdapat kenaikan sebanyak 125 instansi.

Perbaikan tersebut menjadi modal penting untuk meningkatkan akurasi pengambilan keputusan, interoperabilitas layanan, dan penerapan sistem merit berbasis data.

Bapak Ibu Yang Kami Hormati (Interoperabilitas Data dengan Kementerian/Lembaga Slide 18)

Sampai dengan Mei 2026, interoperabilitas data telah dilakukan dengan 22 kementerian dan lembaga serta kerja sama dengan 7 mitra non-kementerian/lembaga. Pemanfaatannya antara lain mencakup sinkronisasi data kependudukan, data perpajakan, data pendidikan dan pelatihan, data LHKPN, data pengawasan netralitas, data bantuan sosial, layanan identitas digital, data sertifikasi kompetensi, serta pemanfaatan data Jabatan Fungsional.

Interoperabilitas ini diarahkan untuk mengurangi duplikasi proses, meningkatkan validitas data, dan mempercepat pelayanan kepada ASN maupun instansi pemerintah.

Bapak Ibu Yang Kami Hormati (Capaian Skor Kelengkapan Arsip ASN Digital Slide 19)

Dalam pengelolaan arsip ASN digital, Lemari Digital atau LeDi-DMS telah digunakan oleh seluruh PNS pada 642 instansi. Per 4 Juni 2026, sebanyak 49.948.980 arsip ASN telah tersimpan pada LeDi-DMS, meningkat 96,5 persen dibandingkan posisi awal Tahun 2026 sebanyak 25.415.174 arsip. Rata-rata skor arsip nasional berada pada angka 57,6 atau kategori lengkap. Sebanyak 12 instansi berada pada kategori sangat lengkap, 397 instansi berada pada kategori lengkap, 233 instansi berada pada kategori cukup lengkap, dan tidak terdapat instansi pada kategori kurang lengkap. BKN

juga terus mendorong proses verifikasi usulan melalui myASN agar dokumen yang tersimpan semakin akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bapak Ibu Yang Kami Hormati (Penyelamatan Arsip ASN Terdampak Bencana di Sumatera

Slide 20)

BKN memberikan perhatian khusus terhadap penyelamatan arsip ASN yang terdampak bencana di Sumatera. Berdasarkan data per 4 Juni 2026, terdapat 184.332 PNS pada 39 instansi terdampak di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.

Jumlah arsip ASN yang berhasil diselamatkan melalui Lemari Digital mencapai 2.627.978 dokumen. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan 2.194.225 dokumen pada 31 Maret 2026 dan 1.142.925 dokumen pada 1 Desember 2025. Upaya ini menunjukkan pentingnya digitalisasi arsip untuk menjaga keberlanjutan layanan kepegawaian di tengah kondisi kedaruratan.

Bapak Ibu Yang Kami Hormati (Fasilitasi Penilaian Kompetensi dan Potensi ASN Slide 21)

Dalam rangka mendukung penerapan manajemen talenta, BKN terus memfasilitasi penilaian kompetensi dan potensi ASN. Dari jumlah PNS sebanyak 3.570.019 orang, target penilaian ditetapkan sebanyak 593.530 orang atau 16,63 persen.

Realisasi penilaian pada Tahun 2024-2025 mencapai 441.009 ASN. Sampai dengan Mei 2026, terdapat tambahan realisasi sebanyak 10.120 ASN, sehingga total ASN yang telah dinilai mencapai 451.129 orang atau 12,64 persen dari jumlah PNS.

Bapak Ibu Yang Kami Hormati (Akreditasi Lembaga Penilaian Kompetensi Slide 22)

Untuk memastikan kualitas penyelenggaraan penilaian kompetensi, BKN melakukan akreditasi lembaga penilaian kompetensi. Sampai dengan Tahun 2026, terdapat 70 lembaga terakreditasi, terdiri atas 49 lembaga kategori A dan 21 lembaga kategori B. Selain itu, terdapat 17 lembaga yang sedang dalam proses akreditasi, dengan 11 lembaga telah menyelesaikan visitasi dan 6 lembaga dalam tahap persiapan.

Penguatan akreditasi diperlukan untuk memperluas akses penilaian kompetensi yang berkualitas secara lebih merata pada berbagai wilayah Indonesia.

Bapak Ibu Yang Kami Hormati (Pengembangan Kompetensi dan Pelatihan ASN Slide 23-24)

BKN juga menyediakan program pengembangan kompetensi ASN melalui berbagai jenis pelatihan, baik secara daring, luring, maupun blended learning. Pelatihan tersebut mencakup pelatihan fungsional Pranata SDM Aparatur, Analis SDM Aparatur, Asesor SDM Aparatur, Auditor Manajemen ASN, pelatihan teknis fungsional kepegawaian, teknisi manajemen ASN, pelatihan dasar CPNS, pelatihan kepemimpinan, serta orientasi PPPK.

Selain itu, BKN mengembangkan pelatihan mandiri berbasis gamifikasi dan microlearning. Dalam periode 1 Januari sampai dengan 5 Juni 2026, jumlah peserta pelatihan mandiri telah mencapai 32.085 peserta. Materinya mencakup antara lain AI generatif untuk ASN, kenaikan pangkat PNS, pengadaan pegawai, pengembangan kompetensi dengan pendekatan 70:20:10, disiplin, dan pemberhentian.

Bapak Ibu Yang Kami Hormati (Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen Tahun 2026 Slide 25)

BKN telah mendukung pelaksanaan program prioritas Presiden melalui penyelenggaraan seleksi berbasis merit yang transparan, objektif, dan akuntabel. Fasilitas yang telah diberikan antara lain seleksi PPPK pada Kementerian HAM sebanyak 23.836 peserta; seleksi Program Hasil Terbaik Cepat Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih sebanyak 380.852 peserta; seleksi masuk sekolah non-ikatan kedinasan Universitas Pertahanan sebanyak 15.778 peserta; ujian dinas atau ujian penyesuaian kenaikan pangkat sebanyak 5.800 peserta; serta uji kompetensi jabatan fungsional sebanyak 131 peserta.

Dalam pengelolaan PNPB Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen, target penerimaan Tahun 2026 sebesar Rp20.322.900.000. Realisasi penerimaan mencapai Rp2.883.500.000 atau 14,19 persen. Capaian ini masih dipengaruhi oleh belum ditetapkannya kebijakan pengadaan masuk sekolah kedinasan Tahun 2026.

Bapak Ibu Yang Kami Hormati (Realisasi Anggaran BKN Tahun 2026 Slide 26)

Pada Tahun Anggaran 2026, pagu BKN sebesar Rp721.648.727.000. Setelah memperhitungkan blokir anggaran PNPB dan SBSN sebesar Rp11.906.235.000, pagu efektif yang dapat dimanfaatkan sebesar Rp709.742.492.000.

Capaian realisasi anggaran BKN mencapai Rp360.766.807.249 atau 50,83 persen. Proyeksi realisasi sampai dengan akhir Juni 2026 sebesar 52 persen.

Dari sisi program, realisasi Program Dukungan Manajemen mencapai 46,25 persen dan Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN mencapai 74,42 persen. Dari sisi jenis belanja, realisasi belanja pegawai mencapai 50,50 persen, belanja barang 57,98 persen, dan belanja modal 11,34 persen. BKN terus melakukan akselerasi pelaksanaan kegiatan dengan tetap menjaga kualitas belanja dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.

Bapak Ibu Yang Kami Hormati (Penghargaan yang diterima Badan Kepegawaian Negara Slide 27)

Sebagai bentuk apresiasi atas kinerja kelembagaan, BKN menerima sejumlah penghargaan pada Tahun 2026. Penghargaan tersebut antara lain penghargaan atas transaksi Kartu Kredit Pemerintah terbanyak pada klaster pagu besar, serta penghargaan utama atas tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI di atas 90 persen untuk Semester II Tahun 2024.

Penghargaan ini menjadi motivasi bagi BKN untuk terus meningkatkan tata kelola keuangan, kepatuhan, dan kualitas layanan publik.

Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI yang saya hormati, selanjutnya kami menyampaikan arah kebijakan dan rencana kerja BKN Tahun 2027.

Bapak Ibu Yang Kami Hormati (Rancangan Awal RKP 2027 dan Delapan Klaster Program Kerja Prioritas Presiden Slide 29)

Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027 adalah “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri”. Dalam kerangka tersebut, terdapat delapan klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) mencakup kedaulatan pangan; kemandirian energi dan air;

pendidikan; kesehatan; hilirisasi dan industrialisasi; infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana; ekonomi kerakyatan dan desa; serta penurunan kemiskinan.

Sebagai instansi pembina manajemen ASN, BKN memposisikan dukungan manajemen ASN sebagai pengungkit keberhasilan program prioritas tersebut, terutama melalui penyediaan SDM aparatur, penguatan sistem merit, digitalisasi layanan, pengawasan, dan dukungan data yang akurat.

Bapak Ibu Yang Kami Hormati (Program Kerja Prioritas Nasional BKN sesuai RPJMN

2025-2029 Slide 30)

Rencana kerja BKN Tahun 2027 sejalan dengan Misi Asta Cita ke-7, yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. Arah kebijakannya adalah reformasi tata kelola pemerintahan.

Dalam RPJMN 2025-2029, BKN mendukung penerapan prinsip meritokrasi dan reformasi manajemen ASN melalui digitalisasi manajemen ASN serta penguatan data profil ASN dengan target satu data. BKN juga mendukung pemerintahan digital melalui pemetaan potensi dan kompetensi PNS dengan target 1.500.000 pegawai.

Bapak Ibu Yang Kami Hormati (Rencana Kerja BKN Tahun 2027 Slide 31)

Selanjutnya, dalam rangka mendukung Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027, dimana telah ditetapkan delapan klaster PKPN yang memuat 60 program prioritas. BKN mempunyai peran strategis sebagai enabler Manajemen ASN nasional. Peran ini diwujudkan melalui penguatan tata kelola Manajemen ASN secara terintegrasi agar setiap program prioritas didukung oleh aparatur yang tepat jumlah, tepat jabatan, tepat kompetensi, dan tepat lokasi penempatan, berbasis sistem merit. Secara umum, rencana kerja BKN Tahun 2027 untuk mendukung delapan klaster PKPN, antara lain:

1. Layanan integrasi data dan layanan manajemen ASN pada ekosistem Pemerintahan Digital Nasional;
2. Pengadaan dan pemenuhan kebutuhan SDM aparatur pada Program Kerja Prioritas Nasional;
3. Penataan Jabatan Fungsional untuk mendukung Program Kerja Prioritas Nasional;
4. Penyusunan model pengelolaan kinerja dan sistem penghargaan ASN berbasis digital untuk peningkatan produktivitas dan kesejahteraan pada sektor prioritas nasional;
5. Pengawasan dan pengendalian kepatuhan manajemen ASN pada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah pelaksana Program Kerja Prioritas Nasional;
6. Penguatan tata kelola, perencanaan, penganggaran, dan dukungan manajemen BKN dalam mendukung Program Kerja Prioritas Nasional;
7. Pemetaan kompetensi dan potensi PNS;
8. Penguatan database profil ASN; dan
9. Pelaksanaan pembinaan manajemen ASN terintegrasi Tahun 2026-2027 kepada seluruh instansi pemerintah.

Bapak Ibu Yang Kami Hormati (Program Kerja Kedeputan Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN Slide 32-33)

Kedeputan Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN akan melaksanakan program yang bersifat lintas klaster prioritas nasional. Program tersebut meliputi penyusunan rekomendasi penataan Jabatan Fungsional untuk mendukung program prioritas; pembinaan bidang budaya kerja dan citra institusi ASN; penguatan kinerja individu yang berdampak pada program prioritas; penyusunan rekomendasi kebijakan redesain kesejahteraan ASN di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; serta penyusunan model pengelolaan kinerja dan sistem penghargaan ASN berbasis digital.

Output yang diharapkan mencakup rekomendasi penataan Jabatan Fungsional, pedoman perilaku ASN berdasarkan nilai dasar dan kode etik, model pengelolaan kinerja berdampak, instansi percontohan penerapan kinerja berdampak, rekomendasi redesain kesejahteraan ASN di wilayah 3T, kerangka model penghargaan berbasis kinerja dan kompetensi, panduan teknis implementasi kinerja digital, serta bahan bimbingan teknis dan sosialisasi.

Bapak Ibu Yang Kami Hormati (Program Kerja Layanan Kepegawaian dalam Mendukung Program Kerja Prioritas Nasional Slide 34-35)

Pada bidang layanan kepegawaian, BKN akan mendukung pemenuhan kebutuhan ASN untuk sektor-sektor prioritas. Dalam bidang kedaulatan pangan, BKN melanjutkan penyelesaian penetapan NIP untuk ASN Badan Gizi Nasional. Dalam bidang pendidikan, BKN mendukung pemenuhan ASN untuk Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, dan Sekolah Nasional Terintegrasi. Dalam bidang kesehatan, BKN mendukung pengisian tenaga kesehatan untuk rumah sakit program prioritas di daerah terpencil.

Selain itu, pengembangan layanan kepegawaian Tahun 2027 diarahkan pada perluasan implementasi kenaikan pangkat dan pensiun otomatis; penyusunan sistem perencanaan kebutuhan ASN berbasis prioritas nasional dan daerah, potensi wilayah, serta proyeksi layanan publik; otomasi verifikasi dan validasi peta jabatan; penyusunan dan penyesuaian peraturan teknis; percepatan penyelesaian SK pensiun dan manfaat pensiun terintegrasi; koordinasi dan pembinaan berkelanjutan; serta penguatan penyediaan layanan manajemen ASN.

Bapak Ibu Yang Kami Hormati (Program Kerja Kedeputan Sistem Digitalisasi Manajemen ASN Slide 36-37)

Pada bidang digitalisasi, BKN akan memastikan sistem digital manajemen ASN dapat mendukung pelaksanaan program prioritas nasional. Fokus pertama adalah dukungan sistem seleksi dan sistem kinerja ASN yang transparan dan berbasis data. Fokus kedua adalah perlindungan dan pemanfaatan arsip ASN, termasuk penanganan arsip ASN pascabencana di Sumatera, percepatan digitalisasi arsip, pengembangan layanan arsip PPPK, penyusutan arsip, dan pemindahan arsip statis.

Rencana kerja digitalisasi juga mencakup pengembangan dan pemeliharaan 47 layanan pada platform ASN Digital; integrasi dan interoperabilitas data ASN; penguatan data profil ASN sebagai bagian dari Prioritas Nasional Tahun 2027; serta penguatan infrastruktur teknologi informasi dan Data Recovery Center BKN. Penguatan DRC diarahkan untuk meningkatkan kapasitas, keandalan, keamanan, dan kecepatan pemulihan layanan apabila terjadi gangguan atau bencana.

Bapak Ibu Yang Kami Hormati (Peran dan Rencana Kerja Pengawasan dan Pengendalian

Manajemen ASN Slide 38-40)

Fungsi pengawasan dan pengendalian manajemen ASN memiliki peran strategis dalam memastikan seluruh program prioritas didukung oleh ASN yang profesional dan berintegritas. Tugas tersebut mencakup pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis manajemen ASN, pengawasan penerapan sistem merit, monitoring dan tindak lanjut rekomendasi, pengawasan disiplin dan kompetensi, serta pembinaan dan supervisi pengawasan manajemen ASN.

Pada Tahun 2027, pengawasan dan pengendalian akan mencakup manajemen talenta, pengelolaan kinerja, pengembangan kompetensi, penguatan budaya kerja dan citra institusi, penghargaan dan pengakuan, disiplin dan upaya administratif, serta digitalisasi manajemen ASN. Untuk pengawasan pengangkatan, pemindahan, promosi, mutasi, dan pengukuhan, serta penegakan disiplin melalui aplikasi I-Mut dan I-Dis, target pengawasan ditetapkan pada 639 instansi.

Bapak Ibu Yang Kami Hormati (Rencana Kerja Pusat Penilaian Kompetensi ASN Slide 41)

Pusat Penilaian Kompetensi ASN akan melaksanakan fasilitasi penilaian kompetensi dan potensi ASN melalui metode assessment center maupun metode lainnya, termasuk integrasi dan rekonsiliasi data penilaian kompetensi. Target output Tahun 2027 adalah 134.317 ASN.

Selain itu, BKN menargetkan akreditasi 15 lembaga penyelenggara penilaian kompetensi ASN baru, terutama pada provinsi yang belum memiliki lembaga penilaian kompetensi.

Bapak Ibu Yang Kami Hormati (Rencana Kerja Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen Slide 42)

Pada Tahun 2027, Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen menargetkan layanan seleksi pengembangan karier kepada 26.055 peserta, layanan seleksi selain pegawai ASN kepada 25.757 peserta, dan layanan seleksi sekolah kedinasan kepada 120.000 peserta. Untuk seleksi CASN, pelaksanaannya akan menyesuaikan kebijakan lebih lanjut dari Presiden melalui Kementerian PANRB.

Penyelenggaraan seleksi diarahkan untuk menghasilkan SDM yang profesional dan berintegritas, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem seleksi berbasis merit.

Bapak Ibu Yang Kami Hormati (Program Pendidikan Ilmu Kepegawaian Slide 43)

BKN juga melanjutkan Program Pendidikan Ilmu Kepegawaian atau PIK sebagai bagian dari pengembangan kompetensi ASN. Program ini telah diselenggarakan pada jenjang S1 sejak Tahun 2007 bagi PNS dari instansi pusat dan daerah. Sejak Tahun 2024, PIK juga dikembangkan pada jenjang S2 bagi PNS internal BKN melalui kerja sama dengan perguruan tinggi terakreditasi.

Pada Tahun 2027, terdapat 68 peserta didik jenjang S1 dan S2 yang masih dalam proses pendidikan dan memerlukan pembiayaan sampai dengan Tahun 2029. Kebutuhan biaya program tersebut sebesar Rp1.743.253.000.

Bapak Ibu Yang Kami Hormati (Rencana Pembangunan Unit Pelayanan Kepegawaian BKN yang Dibiayai SBSN Slide 44)

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik, BKN merencanakan pembangunan Unit Pelayanan Kepegawaian BKN Aceh dan BKN Ambon yang dibiayai melalui SBSN Tahun Anggaran 2027. Pembangunan ini diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan seleksi CASN dan non-CASN serta pelayanan asesmen pegawai di bidang manajemen ASN.

Berdasarkan usulan perubahan alokasi melalui Surat Kepala BKN Nomor 3115/B-PR.05.01/SD/A/2026, total alokasi pembangunan diusulkan menjadi Rp81.484.433.000, terdiri atas Rp38.113.348.000 untuk UPT BKN Aceh dan Rp43.371.085.000 untuk UPT BKN Ambon.

Selanjutnya, kami menyampaikan kondisi pagu indikatif BKN Tahun 2027 dan kebutuhan dukungan tambahan anggaran.

Bapak Ibu Yang Kami Hormati (Pagu Indikatif BKN Tahun 2027 Slide 46)

Berdasarkan Surat Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor B-385/D.9/PP.04.03/05.2026 dan Menteri Keuangan Nomor S-228/MK.03/2026 tanggal 7 Mei 2026, pagu indikatif BKN Tahun 2027 ditetapkan sebesar Rp628.936.442.000, atau enam ratus dua puluh delapan miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah.

Pagu tersebut terdiri atas Rupiah Murni sebesar Rp578.612.011.000, PNPB sebesar Rp23.432.597.000, dan SBSN sebesar Rp82.975.178.000. Pada Program Dukungan Manajemen, Rupiah Murni sebesar Rp522.528.667.000 digunakan untuk belanja operasional pegawai dan belanja operasional barang, sedangkan Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN memperoleh alokasi PNPB sebesar Rp23.432.597.000.

Bapak Ibu Yang Kami Hormati (Perbandingan Pagu Anggaran BKN Tahun 2026-2027 Slide 47)

Apabila dibandingkan dengan pagu Tahun 2026 setelah penyesuaian Surat Nomor S-181, pagu indikatif Tahun 2027 meningkat sebesar 1,53 persen. Namun demikian, struktur alokasinya perlu menjadi perhatian karena pagu operasional mengalami penurunan sebesar 6,46 persen, terutama pada belanja pegawai yang menurun sebesar 9,37 persen.

Di sisi lain, belanja non-operasional meningkat terutama karena kenaikan SBSN untuk pembangunan UPT BKN. Sementara itu, alokasi Rupiah Murni untuk kegiatan non-operasional yang mendukung Program Kerja Prioritas Nasional yang tadi sudah kami sebutkan masih belum tersedia didalam pagu indikatif tersebut. Kondisi ini berpotensi membatasi ruang gerak BKN dalam melaksanakan program prioritas dan menjaga kualitas layanan manajemen ASN.

Bapak Ibu Yang Kami Hormati (Kebutuhan Tambahan Anggaran BKN Tahun 2027 Slide 48)

BKN telah menyampaikan kebutuhan tambahan anggaran kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas melalui Trilateral Meeting tanggal 22 Mei 2026. Kebutuhan tersebut terdiri atas dukungan program prioritas nasional sebesar Rp229.984.300.000 serta pemenuhan kebutuhan belanja operasional sebesar Rp68.631.134.000, dimana didalamnya terdapat kebutuhan kekurangan belanja pegawai sebesar Rp.25.548.719.000.

Dukungan anggaran untuk pelaksanaan program prioritas sangat diperlukan agar BKN dapat menjalankan integrasi data dan layanan manajemen ASN dalam ekosistem Pemerintahan Digital Nasional, pemenuhan SDM aparatur program prioritas, penataan Jabatan Fungsional, pengelolaan kinerja dan sistem penghargaan berbasis digital, pengawasan kepatuhan manajemen ASN, dukungan tata kelola dan penganggaran, pemetaan kompetensi dan potensi PNS, serta penguatan database profil ASN.

Bapak Ibu Yang Kami Hormati (Usulan Tambahan Anggaran BKN Tahun Anggaran 2027 Slide 49)

Dengan demikian, total usulan kebutuhan anggaran BKN Tahun 2027 adalah sebesar Rp298.615.434.000 (dua ratus sembilan puluh delapan miliar enam ratus lima belas juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) yang terdiri atas usulan tambahan belanja pegawai, belanja operasional dan penguatan manajemen ASN untuk mendukung Program Kerja Prioritas Nasional Tahun 2027. Kami mohon dukungan Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI agar kebutuhan tambahan anggaran tersebut dapat disetujui. Dukungan ini diperlukan untuk memastikan layanan manajemen ASN tetap berjalan secara berkelanjutan, target prioritas nasional dapat didukung secara optimal, serta transformasi digital manajemen ASN dapat dilaksanakan dengan tata kelola yang baik.

Penutup

Demikian yang dapat kami sampaikan terkait capaian kinerja Tahun 2026, rencana kerja Tahun 2027, pagu indikatif, dan usulan kebutuhan tambahan anggaran BKN Tahun 2027.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI atas dukungan dan perhatian yang terus diberikan kepada Badan Kepegawaian Negara. Kami percaya bahwa penguatan manajemen ASN merupakan pondasi penting untuk memastikan birokrasi bekerja secara profesional, adaptif, berintegritas, dan mampu memberikan pelayanan publik yang semakin berkualitas.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Om Santi Santi Santi Om.